

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

PROVINSI : BENGKULU
 NAMA SKPD : BADAN PENGHUBUNG
 URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional	- Jumlah program Nasional (RKP) 2 - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD 2	100 %	Program nasional untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu ditetapkan antara lain : 1. Program Pengembangan Agribisnis 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 4 macam yaitu : <i>Nama-nama SOP Terlampir</i>	Ada 4 SOP	<i>Terlampir</i>
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN 0 x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 Buah. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 0 Buah.	0 %)
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada 4/5 x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 5	80 %	Jabatan yang berisi yaitu : 1. Kepala Badan Penghubung 2. Kasubbag Tata Usaha 3. Kasubbid Pengelolaan Anjungan Daerah 4. Kasubbid HAL dan PD

¹ Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPND terkait.
 LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

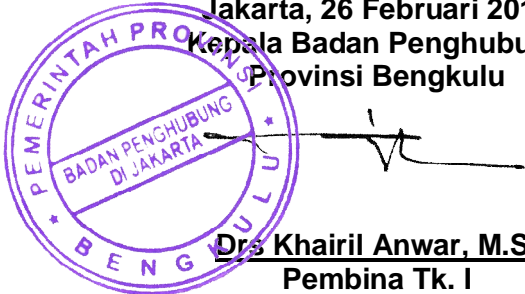
	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
								Jabatan yang kosong yaitu 1. Kasubbid Promosi dan Informasi
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Tidak Ada	Tidak Ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/ update tahun 2017
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi 32 / 6994	- PNS SKPD, sebanyak 32 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 6994 personil	0,45 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/ update tahun 2017 • Total PNS Provinsi belum bisa diakses
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada 1/5 x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 5 org.	20%	Mengacu kondisi SKPD terakhir/ update tahun 2017
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada 5/5 x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 5 jbt.	100 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/ update tahun 2017
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan pembangunan berikut jumlahnya	Apabila Ada, sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD	3 jenis dokumen	

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN	
	Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD 8/8 x 100%	- Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 8 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 program.	100%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs	
	Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD 8/8 x 100%	- Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD 8/8 x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program.	100 %	Mengacu Dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2017	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD Rp 8.123.869.582,00,-	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% Rp. 8.123.869.582,00x 100% Rp. . 1.922.413.632.975	- Total Alokasi belanja SKPD, sebesar Rp. 8.123.869.582,00,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.922.413.632.975	0,43 %	Mengacu APBD tahun 2017 terakhir • Total belanja APBD belum bisa diakses

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD Rp. 191.900.000,00 ,-	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% Rp. 191.900.000 x100% Rp. 28.747.016.424,-	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 191.900.000,00,- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 28.747.016.424,-	0,67 %	Realisasi
	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Rp. 795.608.000,-	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% Rp. 795.608.000,- x100% Rp. 3.751.366.000,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 795.608.000,- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 3.751.366.000,-	21,21 %	Realisasi
		16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD Rp. 269.666.828,-	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% Rp. 795.608.000,- x 100% Rp. 8.123.869.582,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 795.608.000,- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 8.123.869.582,-	9,79 %	Realisasi
	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA dan Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. CALK 3. NERACA	Ada sebanyak 3 jenis	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 34.672.822.206,00-	100%

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					%	Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp.34.672.822.206,00-	
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Mass Media / Media Sosial	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 3 buah - Maklumat Pelayanan - Papan Pengumuman Kegiatan Badan Penghubung - FB - Kotak saran 2. Mobil Ambulans totalnya sebanyak 1 unit	Jumlah sebanyak 2 jenis.	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabil Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017	70 %	Kepuasan Masyarakat tentang Kepuasan Pelayanan Mess

Jakarta, 26 Februari 2018
 Kepala Badan Penghubung
 Provinsi Bengkulu



Drs Khairil Anwar, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP 19711031 199101 1 001